

**DINAMIKA KERJASAMA PERDAGANGAN EKSPOR BERAS
VIETNAM KE TIONGKOK DALAM ISU KONFLIK LAUT CINA
SELATAN TAHUN 2011-2015**

Oleh : Rizka Aprilini

Pembimbing FAISAL RANI. S.IP.M.A

Email : riskaapriliniim@gmail.com

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas FISIP Universitas Riau

Alamat : Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru

Abstract

This research will examine the dynamics of trade cooperation of Vietnamese rice exports to China in the South China Sea conflict issues that have influenced the relations between the two countries.

The sources of data used in this research are books, journals, working papers, valid news from websites and newspaper, to describe the process by analyzing the phenomenon based on existing data.. To analyze the research question, the writer uses a perspective, specifically the perspective liberalism, use a Teori of The International Political Economy

The relationship between Vietnam with China (China) is known to have a history that is long and winding. The success of the cooperation in the field of export of raw materials such as rubber, steel and vegetables is the largest and most rice, does not necessarily make relations between the two countries is free from conflict. Although Vietnam and China (China) adopts the same ideology, the ideology of communism, but often there are differences in political decisions. The highlight is a rift between the two countries occurred on 17 February 1979, where the Chinese do military invasion into the territory of Vietnam.

Keyword: South China Sea, Dynamics of export Rice Trade Cooperation Between Vietnam And China Amid Conflict Issues South China Sea

Pendahuluan

Tulisan ini akan mengkaji tentang dinamika kerjasama perdagangan ekspor beras Vietnam ke Tiongkok dalam isu konflik laut cina selatan yang telah ikut mempengaruhi hubungan antar kedua negara tersebut. Hubungan antara Vietnam dengan Tiongkok (Cina) memang dikenal memiliki sejarah yang cukup panjang dan berliku. Keberhasilan dalam menjalin kerjasama dibidang ekspor

barang mentah seperti karet, baja dan sayur- sayuran dan yang paling terbesar adalah beras, tidak lantas menjadikan hubungan kedua negara ini bebas dari konflik. Meski Vietnam dan Tiongkok (China) menganut sistem ideologi yang sama, yaitu ideologi komunis, namun seringkali terdapat perbedaan dalam kebijakan politik. Puncak keretakan hubungan kedua negara ini terjadi pada tanggal 17 february 1979, Dimana Tiongkok melakukan Invansi militer ke wilayah Vietnam.

Perdamaian antara Vietnam dengan Tiongkok (Cina) dapat diwujudkan setelah Pangeran Sihanouk memulai negosiasi dengan HunSen pada 1987, dimana pada akhirnya Tiongkok (Cina) dan Vietnam menyepakati sebuah perjanjian normalisasi pada pertemuan rahasia di Chengdu pada September 1990 dan menyusun normalisasi pada November 1991. Permusuhan antara Tiongkok (Cina) dan Vietnam akhirnya terselesaikan juga setelah adanya kenyataan bahwa Uni Soviet mulai runtuh dan kekuatan komunis di dunia mulai meredup.¹

Kerjasama Vietnam dengan Tiongkok kembali dimulai setelah terdapat restorasi hubungan diplomatik antara Vietnam dengan Tiongkok dari tahun 1991-2007 yang didasarkan pada prinsip “*Sixteen Golden Words*” yaitu tetangga yang baik, kerjasama total, perdagangan stabil, jangka panjang, berorientasi kedepan dan penyelesaian masalah sengketa perbatasan Gulf or Tonkin. Dengan adanya restorasi ini telah mengantarkan perusahaan asal Tiongkok untuk menanamkan modal pada lebih dari 80 proyek yang tersebar di Vietnam dengan nilai US\$180 juta. Tak hanya itu, China menawarkan dana hibah yang akan dipinjamkan dengan bunga yang rendah senilai US\$45 juta.²

¹ http://m.kompasiana.com/ryakair/jalan-panjang-untuk-perdamaian-permusuhan-vietnam-cina-1975-1991_551754a58133118c669de5b1, diakses tanggal 8 November 2016

² <http://mhmdsuaiuddin.blogspot.co.id/2015/09/southeast-asia-long-life-economic.html?m=1>, diakses tanggal 8 November 2016

Namun hubungan yang baik ini tidak bertahan lama, pasalnya akibat keegoisan Tiongkok dalam mempertahankan klaimnya terhadap pulau di Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan konflik. Konflik di Laut Cina Selatan muncul saat Tiongkok (China) mengklaim kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Paracel (Xisha) dan Spratly (Nansha)

Kerangka atau Konsep Dasar Teori

Ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam system internasional. Menurut Mohtar Mas'ood, persoalan yang mendasar dalam hubungan ekonomi-politik dalam arena internasional maupun domestik adalah persoalan ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Selain itu EPI merupakan studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan yang internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam buku teks lain, EPI adalah ‘*the study of the interplay of economics and politics in the world arena*’. Dalam hal ini ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan sedangkan politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang

mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.³

Konsep Tentang Dampak (Aksi Rreaksi) Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan dua respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi juga merupakan akibat dari tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara sebagai sasaran dari pengaruh langsung maupun tidak langsung, harus mengambil respon dalam bentuk kebijakan dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lain agar menerima keinginan politiknya. Kemudian dalam interaksi negara antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional, negara tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya baik politik dalam negeri maupun luar negeri. Kepentingan nasional adalah tujuan utama bagi suatu negara salah satu kepentingan nasional adalah keamanan negara⁴

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri,

perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan.⁵

Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberalisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (*core values*) tidak berubah hanya ada tambahan-tambahan saja dalam *versi* yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir. Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan.⁶

³ Mohtar Mas'ood, 2008. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 4

⁴ Anak Agung Banyu Prawita. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: Hal 40-41

⁵ Sobri. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. BPFE. UI. Yogyakarta. Hal 35

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>

HUBUNGAN DIPLOMASI VIETNAM – TIONGKOK

Diplomasi adalah instrumen dari politik luar negeri suatu negara. Oleh sebab itu, dengan siapa sebuah negara akan berdiplomasi, tujuan apa yang ingin diraih dari diplomasi tersebut, dan bagaimana cara sebuah negara berdiplomasi akan bergantung dari rumusan politik luar negeri negara tersebut. Ideologi memiliki peranan penting dalam perumusan politik luar negeri. Sebab walaupun politik luar negeri dirilis oleh negara, aktor yang merumuskannya adalah manusia yang bertindak berdasarkan ideologinya. Dalam hal ini, Ideologi adalah seperangkat nilai yang mempengaruhi penilaian suatu entitas mengenai bagaimana dunia ini seharusnya bekerja. Ideologi akan menentukan mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang kawan dan mana yang lawan.⁷

Kerjasama Vietnam telah terjalin dengan berbagai negara di dunia, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Kerjasama bilateral dengan beberapa negara terjalin bukan hanya berdasar kepentingan ekonomi, namun juga ada kepentingan di bidang lain, seperti politik, hukum, hankam, sosial-budaya. Kerjasama Vietnam dengan Tiongkok pun demikian, yang tidak hanya menekankan pada aspek politik, namun juga berusaha terus-menerus meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hingga sosial-budaya.

Hubungan Vietnam dan Tiongkok telah mengalami dinamika kompleks sejak kekaisaran Tiongkok

dan memiliki hubungan yang ekstrim (permusuhan maupun persahabatan) yang menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat Vietnam terhadap Tiongkok. Selama 60 tahun terakhir, terdapat pandangan bahwa Tiongkok cenderung menindas dan berupaya mengontrol Vietnam secara politik sehingga menimbulkan kemarahan dan kebencian kepada Tiongkok.⁸

Hubungan kedua negara ini juga diwarnai dengan berbagai kompleksitas, baik hubungan kerjasama setelah normalisasi hubungan pada tahun 1991 maupun hubungan ketegangan dan rawan konflik akibat hubungan bilateral yang asimetris maupun akibat pengalaman historis kedua negara yang diwarnai permusuhan.

Normalisasi hubungan antara Tiongkok-Vietnam dimulai ketika Tiongkok dibawah Deng Xiaoping memulai normalisasi hubungan dengan Soviet pada tahun 1982. Salah satu persyaratan yang disampaikan Tiongkok adalah perlunya Soviet mengurangi pengaruhnya di Indo Tiongkok yang diwujudkan dengan mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada akhir November 1987, Tiongkok dan Laos (yang masih dibawah kendali Vietnam) melakukan normalisasi hubungan yang menandai melunaknya hubungan Sino-Vietnam. Kemudian pada September 1990, dilaksanakan pertemuan di Chengdu, antara Tiongkok-Vietnam untuk membahas pengakhiran pendudukan Vietnam di

7

<http://peacefulanarchyjournal.blogspot.co.id/2013/10/pengaruh-ideologi-konfusianisme.html>, diakses tanggal 4 Februari, 2017

⁸ Conflict in The South China Sea: China's Relations With Vietnam and The Philippines oleh Ian Storey. Diakses melalui <http://www.japanfocus.org/-Ian-Storey/2734>, diakses pada tanggal 4 Februari 2017

Kamboja sehingga membuka jalan normalisasi hubungan Tiongkok-Vietnam. Pada November 1991, perjanjian *Paris Peace Accords* yang menentukan nasib Kamboja menjadi tahap awal perjanjian normalisasi hubungan Sino-Vietnam baik antar negara maupun antar kedua partai komunis di kedua negara.

Periode 1991 sampai dengan 2000 merupakan periode restorasi hubungan baik antara kedua negara untuk membangun kembali kepercayaan kedua negara. Pada periode 1990–1992, telah dilakukan 219 kunjungan politis antara Tiongkok dan Vietnam. Pemerintah kedua negara telah membuat enam *joint communiqués* atau deklarasi pada 1991, 1992, 1994, 1995, 1999, dan 2000 dengan tujuan memperjelas arah hubungan bilateral. Pada tahun 2000, pemerintah kedua negara menandatangani perjanjian perbatasan di Beibu Gulf dan kerjasama bidang perikanan yang dilanjutkan dengan deklarasi kerjasama komprehensif. Selain itu, hubungan kedua negara yang semakin membaik terlihat dengan adanya perjanjian yang ditandatangani kedua negara pada Juni 2008. Kemudian pada November 2009, Tiongkok dan Vietnam menandatangani perjanjian yang menandai berakhirnya negosiasi perjanjian perbatasan yang telah dibahas selama 35 tahun. Perjanjian ini meliputi perjanjian untuk menentukan batas-batas wilayah dan penanaman pagar hidup sebagai penanda perbatasan, perjanjian regulasi manajemen perbatasan dan perjanjian yang mengatur tentang pintu masuk ke kedua negara.⁹ Dengan demikian,

⁹ Joseph Y. S Cheng, "Sino-Vietnamese Relations in the Early Twenty-first Century:

dapat dikatakan bahwa tahun 2009 merupakan tahun kedua negara mampu menyepakati penyelesaian untuk masalah perbatasan darat yang selama ini merintang hubungan kedua negara.

Meskipun telah terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam hubungan bilateral Tiongkok-Vietnam sejak normalisasi hubungan dari tahun 1991 sampai dengan 2009, namun sengketa teritorial antara kedua negara tetap terjadi setelah tahun 2009 sehingga menghantui harmonisasi hubungan kedua negara. Meskipun telah berhasil menyelesaikan negosiasi perjanjian perbatasan Tiongkok-Vietnam pada 2009, namun sengketa di laut Tiongkok Selatan masih menyebabkan terjadinya *clash*.

Fase-Fase Perkembangan Hubungan Bilateral Tiongkok-Vietnam

Hubungan Tiongkok-Vietnam telah mengalami perkembangan yang dramatis dari teman menjadi lawan kemudian menjadi teman lagi dan seterusnya selama empat dekade terakhir. Kurang dari satu dekade setelah tahun 1969 (kematian Ho Chi Minh), kedua negara ini terlibat dalam perang di perbatasan Tiongkok-Vietnam yang menyebabkan terputusnya hubungan bilateral kedua negara. Karakter hubungan mereka adalah dari "*comradeship plus brotherhood*" menjadi "*the most direct and most dangerous enemies*."¹⁰

Secara singkat, sejak berdirinya RRT sebagai sebuah negara tersendiri, hubungan Vietnam-Tiongkok telah melalui

Economics in Command?" *Asian Survey*, Vol. 51, No. 2, (2011) hal. 385

¹⁰ Ibid, hal 390

empat fase utama¹¹. Fase pertama, yang berlangsung dari periode 1949 sampai 1978 adalah hubungan bilateral yang bersifat saling menguntungkan, ideologi *comradeship*, kepercayaan tinggi dan dukungan penuh. Tiongkok merupakan sumber dukungan dan bantuan yang sangat besar dan berarti bagi *Democratic Republic of Vietnam* (DRV) dalam melewati perang melawan Perancis dan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Fase kedua dimulai dengan invasi Vietnam ke Kamboja pada 1978 dan perang perbatasan antara Vietnam-Tiongkok pada 1979 dan berakhir pada 1990. Kedekatan antara Vietnam dengan Uni Soviet pada periode ini menjadi penyebab memburuknya hubungan Vietnam dengan Tiongkok. Selain itu, dukungan Tiongkok dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam menyebabkan semakin memburuknya hubungan Tiongkok-Vietnam. Periode ini diwarnai dengan antagonisme, perang dan kecurigaan berkepanjangan.

Fase ketiga dimulai pada 1991, dengan dilakukannya restorasi hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2007. Pada tahun-tahun pertama periode ini terlihat adanya kemajuan pesat dalam hal hubungan bilateral kedua negara berdasarkan prinsip “enam belas kata emas” atau *sixteen golden words* yaitu tetangga yang baik, kerjasama total, perdagangan yang stabil, jangka panjang dan berorientasi ke depan dan penyelesaian masalah sengketa perbatasan¹². Periode antara tahun

1991 sampai akhir 1998 menunjukkan adanya restorasi hubungan antara kedua negara dengan adanya 219 kunjungan politik dan dibuatnya enam deklarasi pada 1991, 1992, 1994, 1995, 1999, dan 2000 untuk menentukan arah hubungan kedua negara¹³. Akan tetapi, semangat kerja sama dan persahabatan baru ini terganggu oleh ketakutan Vietnam akan kebangkitan Tiongkok dan tindakan agresif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Fase keempat, yang dimulai pada 2008, menunjukkan tindakan asertif Tiongkok terhadap upaya Vietnam untuk mempertahankan klaim kedaulatannya dan integritas teritorialnya di Laut Tiongkok Selatan. Periode tahun 2008 sampai dengan 2011 merupakan tahun-tahun yang dipenuhi dengan berbagai insiden penangkapan maupun pengusiran kapal-kapal Vietnam oleh kapal patrol Tiongkok di perairan dekat kepulauan Paracel. Periode ini juga menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas penangkapan ikan oleh Vietnam dan meningkatnya perhatian Tiongkok terhadap kawasan yang masih menjadi sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Meskipun demikian, hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup dramatis khususnya setelah normalisasi hubungan pada tahun 1990. Perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi kedua negara telah meningkat dengan pesat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara yang melebihi target yang ditetapkan oleh Perdana Menteri kedua negara pada tahun 1998 di Beijing¹⁴. Pada akhir

¹¹ *China, What's Next?* Diakses dari <http://the-diplomat.com/whats-next-china/vietnam/>, diakses tanggal 4 Februari 2017

¹² *Ibid*, hal 380

¹³ *Ibid*, hal 381

¹⁴ *Ibid*, hal 382

tahun 2000, berbagai perusahaan Tiongkok telah menanamkan modal pada lebih dari 80 proyek di Vietnam, dengan nilai kontrak hampir mencapai \$180 juta. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga menawarkan hibah serta pinjaman rendah bunga pada Vietnam dengan nilai mencapai \$45 juta.

Oleh kedua negara, tahun 2010 diperingati sebagai ulang tahun ke-60 dimulainya hubungan diplomatik Sino-Vietnam dengan normalisasi resmi pada tahun 1990. Hal ini menjadi dasar bagi kemajuan niat baik kedua negara dan peningkatan nilai perdagangan.

ALASAN TERJADI PENINGKATAN EKSPOR BERAS VIETNAM KE TIONGKOK

Perkembangan Beras Vietnam

Berdasarkan data USDA, besaran rata-rata total konsumsi beras tertinggi di dunia terdistribusi pada negara-negara produsen beras terbesar dunia. Secara umum rata-rata konsumsi beras dunia tertinggi di China dengan total konsumsi rata-rata mencapai 145,86 juta ton per tahun, di posisi kedua adalah India dengan rata-rata konsumsi mencapai 97,08 juta ton dan Indonesia berada di posisi ketiga dengan rata-rata konsumsi beras per tahun mencapai 38,41 juta ton. Total konsumsi beras terbesar selanjutnya adalah Bangladesh, Vietnam, Philipina, Thailand, Myanmar, Jepang dan Brasil dengan kisaran konsumsi beras rata-rata antara 7,91 juta ton hingga 34,92 juta ton setara beras giling.¹⁵ Jika dikaitkan dengan produksi beras, beberapa negara produsen cenderung mengalami

kekurangan pasokan untuk konsumsi antara lain China, Indonesia, Bangladesh, Philipina dan Jepang, sebagai akibat besarnya total konsumsi beras dibandingkan pasokan beras yang berasal dari produksi. Kekurangan pasokan beras tertinggi antara tahun 2009 hingga 2013 terjadi di China yaitu mencapai 2,51 juta ton.

Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara yang tetap bertahan sebagai pengekspor beras hingga kini. Vietnam sebenarnya belum lama masuk kelompok pengekspor beras. Bahkan dalam sejarahnya, negeri yang pernah tercabik-cabik perang ini pernah mengalami kekurangan pangan (1985-1986) yang begitu dahsyat. Namun dengan kebijakan yang komprehensif disertai strategi yang tepat, Vietnam berangsur-angsur menjadi salah satu negara pengekspor beras terkemuka. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Doi Moi, yang berarti renovasi yang ditetapkan Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam (PKV) pada 15-18 Desember 1986 dan mulai diterapkan pada tahun 1987. Program utama pada periode 1987-1991 adalah meningkatkan produksi pangan dan bahan konsumsi lain dengan sasaran pemenuhan kebutuhan domestik dan mulai mengekspor.

Kebijakan Doi Moi mengizinkan petani memproduksi sebanyak mungkin (sebelum dibatasi dan ditentukan oleh pemerintah), dan pada tahun 1989 untuk pertama kali setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, Vietnam Mengekspor Beras sebanyak 1 juta ton.¹⁶

¹⁵ Ibid, hal 51

¹⁶

Pada tabel berikut ini, dapat dilihat hasil panen beras Vietnam yang dibandingkan dengan penggunaannya domestiknya.

Tabel 3.3
Produksi Beras Vietnam Tahun 2012-2015
(000 ton)

Ket.	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Produksi	28.210	28.169	29.233	26.166
Penggunaan Domestik	20.789	21.121	21.499	22.000
Volume Ekspor	6.700	6.325	6.700	6.900

Sumber: Outlook Padi, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi beras Vietnam sejak tahun 2012-2015 mengalami surplus, yang terlihat dengan tingginya jumlah produksi jika dibandingkan dengan penggunaan beras untuk kebutuhan dalam negeri. Dari tabel juga dapat dilihat volume ekspor beras Vietnam, dimana pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan juga pada tahun 2015.

Impor Beras Tiongkok

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang beras terbesar Vietnam sejak tahun 2012. Peningkatan ekspor beras Vietnam ke Tiongkok ini disebabkan buruknya hasil panen padi di Tiongkok Selatan dan juga di Tiongkok utara yang telah menderita beberapa kali gagal panen, karena gelombang panas yang sangat menyengat, yang mengakibatkan kekeringan dan kelangkaan air untuk irigasi pertanian.¹⁷ Kegagalan panen juga terjadi pada bulan Oktober 2014 di provinsi Anhui Tiongkok Timur.

Gagalnya panen ini akibat benih padi yang diberikan kepada petani memiliki ketahanan yang buruk terhadap penyakit.¹⁸

Kegagalan panen yang dialami Tiongkok tersebut mengharuskan Tiongkok melakukan mengimpor beras. Pada table berikut, dapat dilihat perkembangan volume impor beras Tiongkok.

¹⁷

<https://bambangmoe.wordpress.com/2014/04/23/china-dan-vietnam-berusaha-bekerja-sama-untuk-meningkatkan-perdagangan/>, diakses tanggal 4 Februari 2017

¹⁸

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-04/14/content_20426057.htm, diakses 6 Februari 2017

Tabel 3.4
Perkembangan Volume Impor Beras
Tiongkok Tahun 2012-2015
(000 Ton)

Ket.	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Produksi	142.530	142.530	144.560	145.770
Konsumsi	144.000	146.300	148.400	151.000
Volume Impor	3.483	4.168	4.500	4.700

Sumber : USDA, 2017¹⁹

Tabel diatas menunjukkan bahwa volume impor beras yang dilakukan oleh Tiongkok periode tahun 2012-2015 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan ini tidak terlepas dari adanya kegagalan panen yang mereka alami. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mulai tahun 2012, volume impor beras Tiongkok ini paling banyak berasal dari Vietnam. Vietnam saat sekarang ini kurang lebih menguasai pangsa pasar ekspor beras ke Tiongkok sebesar 60%.

Konflik Laut Tiongkok Selatan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Spratly, diikuti oleh Tiongkok pada awal abad ke-20 dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Setahun setelah keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris pada tahun 1974, Tiongkok bergerak cepat mengamankan wilayah ini. Militer Tiongkok dikirim untuk menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka

mengibarkan bendera dan mengalahkan satu garnisun pasukan Vietnam di sana. Pasukan Vietnam mundur dan mendirikan pos permanen sekaligus menduduki Kepulauan Spratly. Pada saat yang sama Tiongkok memperkuat militernya di Pulau Woody, pulau terbesar di Kepulauan Paracels. Setelah Vietnam Utara dan Selatan bersatu dan membentuk Republik Sosialis Vietnam, negeri itu tetap mengukuhkan klaim terhadap Spratly dan Paracels. Vietnam mengklaim Tiongkok tak pernah mengklaim kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracels sebelum 1940-an. Sementara, Vietnam mengaku telah menguasai kedua kepulauan tersebut sejak abad ke-17 dan mengklaim memiliki berbagai dokumen itu membuktikan hal tersebut.²⁰

Selain Vietnam, Filipina juga ikut mengklaim kepemilikan Kepulauan Spratly. Filipina mendasarkan klaim ini karena lokasi geografisnya yang dekat dengan Kepulauan Spratly sehingga menganggap kepulauan itu sebagai bagian dari wilayahnya. Filipina dan Tiongkok berebut gundukan Scarborough yang di dalam bahasa Tiongkok disebut dengan nama Pulau Huangyan, rangkaian pulau karang seluas 46 kilometer persegi. Kawasan sengketa ini berada sejauh 160 kilometer dari daratan Filipina dan berjarak lebih dari 800 kilometer dari Tiongkok. Sementara Malaysia mengklaim beberapa pulau kecil di Kepulauan Spratly sebagai wilayah negeri itu.²¹

¹⁹ USDA, Grain World Markets and Trade, Februari 2017.

²⁰ <http://bangka.tribunnews.com/>

²¹ <http://bangka.tribunnews.com/>, Op.cit

**PERKEMBANGAN
KERJASAMA PERDAGANGAN
BERAS VIETNAM KE
TIONGKOK**

**Perkembangan Ekspor Beras
Vietnam dari Tahun ke Tahun**

Ekspor beras Vietnam dimulai pada tahun 1989 untuk pertama kali setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, Vietnam mengekspor beras sebanyak 1 juta ton. Vietnam berubah dari negara importir menjadi negara eksportir terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Hal ini dikarenakan adanya ekspansi areal tanam dan peningkatan hasil panen. Perbaikan irigasi dan drainase, penggunaan pupuk intensif, dan program kuota ekspor beras dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Program ekspor beras tersebut membuat harga ekspor beras Vietnam relatif lebih rendah (kualitas beras yang sama) dibandingkan dengan Thailand.

Vietnam mengekspor beras ke 120 negara. Asia dan Afrika adalah dua importir utama beras Vietnam, seperti Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Kuba, Pantai Gading, Angola dan Ghana. Kemudian muncul Tiongkok sebagai pembeli beras terbesar. Tiongkok menjadi pasar ekspor beras terbesar Vietnam, peningkatan nilai ekspor yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2012, ekspor beras Vietnam ke China luar biasa melonjak menjadi 2,2 juta ton, 10 kali lebih dari tahun 2011.²² Pada tahun ini, beras Vietnam menguasai 35% impor beras yang dilakukan oleh Tiongkok.

²²<http://en.vietnamexport.com/index.php/news/item/9022-vietnam-to-boost-rice-export-to-china.html>, diakses tanggal 15 Februari 2017

Pada tahun 2013, China mengurangi hambatan untuk impor beras, untuk meningkatkan sumber pasokan makanan. Ini dikarenakan produksi beras China diperkirakan turun 0,7 persen. Selain itu, kenaikan harga beras dalam negeri telah menyebabkan Cina untuk meningkatkan impor beras dari 2013 sampai 2014. Meningkatkan ekspor beras ke China tidaklah mudah. Thailand adalah saingan terbesar beras Vietnam di dunia pada umumnya dan di Cina pada khususnya. Bersama dengan pelonggaran impor beras, China telah sepakat untuk meningkatkan impor beras dari Thailand ke satu juta ton per tahun dalam lima tahun yang dimulai dari tahun 2013. Selain itu, Thailand telah menurunkan harga beras bermutu tinggi untuk meningkatkan ekspor. Eksportir beras Vietnam akan menghadapi banyak kesulitan dalam persaingan dengan beras Thailand. Beras Vietnam juga akan menghadapi persaingan yang ketat dengan negara berkembang pesaingnya seperti Myanmar dan Kamboja. Namun, Asosiasi Makanan Vietnam (VFA) mengatakan harga beras Vietnam yang lebih rendah, membuat tanaman pangan Vietnam lebih menarik bagi konsumen Cina.²³

Tiongkok yang sebagian besar telah mengimpor beras dari Vietnam, Thailand dan Pakistan, tahun 2016 telah menambahkan Laos ke daftar pemasok beras. Vietnam telah melaporkan penurunan ekspor beras, tetapi Tiongkok tetap menjadi pasar ekspor terbesar bagi Vietnam, yang dikonsumsi 33,4 persen dari total ekspor beras. Namun, Nguyen Trung Kien dari Ipsard, sebuah

²³ Ibid

lembaga pengembangan pertanian, mencatat bahwa pangsa pasar beras Vietnam di Tiongkok mengalami penurunan. Tahun 2012-2013, sekitar 65% impor beras Tiongkok berasal dari Vietnam. Angka ini turun menjadi 53% pada 2014 dan 47% pada bulan keempat pertama 2015.²⁴ Jika dilihat, hal ini berbanding terbalik dengan nilai ekspor beras Vietnam ke Tiongkok sejak tahun 2012-2014. Nilai ekspor Vietnam ke Tiongkok pada tahun 2012 sebesar 23%, tahun 2013 ekspor beras ke Tiongkok mengalami kenaikan menjadi 30% dan 31% pada tahun 2014 dari nilai ekspor Vietnam secara keseluruhan.²⁵

Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 ini akibat adanya skema harga baru yang diterapkan oleh Thailand dengan menjual beras dengan harga jauh di bawah harga pasar. Selain itu penurunan pada tahun 2015 ini juga dipengaruhi oleh diversifikasi strategi impor yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kuota impor beras dari berbagai sumber.²⁶

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Banyu Prawita. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

²⁴

<http://english.vietnamnet.vn/fms/business/150335/will-vietnam-have-to-compete-with-lao-rice-in-china.html>, diakses tanggal 15 Februari 2017

²⁵ <http://atlas.media.mit.edu>, Loc.Cit

²⁶

<http://english.vietnamnet.vn/fms/business/131354/vietnam-s-rice-exports-drop-as-thailand-offloads-overstocks.html>, diakses tanggal 15 Februari 2017

Conflict in The South China Sea: China's Relations With Vietnam and The Philippines oleh Ian Storey. Diakses melalui <http://www.japanfocus.org/-Ian-Storey/2734>, diakses pada tanggal 4 Februari 2017

China, What's Next? Diakses dari <http://the-diplomat.com/whats-next-china/vietnam/>, diakses tanggal 4 Februari 2017

Joseph Y. S Cheng, "Sino-Vietnamese Relations in the Early Twenty-first Century: Economics in Command?" *Asian Survey*, Vol. 51, No. 2, (2011)

Mohtar Mas'ood, 2008. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sobri. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. BPFE. UI. Yogyakarta.

http://m.kompasiana.com/ryakair/jalan-panjang-untuk-perdamaian-permusuhan-vietnam-cina-1975-1991_551754a58133118c669de5b1, diakses tanggal 8 November 2016

<http://mhmdsuaifuddin.blogspot.co.id/2015/09/southeast-asia-long-life-economic.gtml?m=1>, diakses tanggal 8 November 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>

<http://peacefulanarchyjournal.blogspot.co.id/2013/10/pengaruh-ideologi-konfusianisme.html>, diakses tanggal 4 Februari, 2017

<https://bambangmoe.wordpress.com/2014/04/23/china-dan-vietnam-berusaha-bekerja-sama-untuk-meningkatkan-perdagangan/>, diakses tanggal 4 Februari 2017

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-04/14/content_20426057.htm, diakses 6 Februari 2017
USDA, Grain World Markets and Trade, Februari 2017.

<http://bangka.tribunnews.com/http://en.vietnamexport.com/index.php/news/item/9022-vietnam-to-boost-rice-export-to-china.html>, diakses tanggal 15 Februari 2017

<http://english.vietnamnet.vn/fms/business/150335/will-vietnam-have-to-compete-with-lao-rice-in-china.html>, diakses tanggal 15 Februari 2017
¹<http://atlas.media.mit.edu>, Loc.Cit

<http://english.vietnamnet.vn/fms/business/131354/vietnam-s-rice-exports-drop-as-thailand-offloads-overstocks.html>, diakses tanggal 15 Februari 2017